

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2020
UAPPA-W Maluku

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas
Ambon - Maluku 97128
Telp. 0911 341171 Fax. 0911 355296
e-mail : korwil.[maluku@gmail.com](mailto:korwil.maluku@gmail.com)



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
WILAYAH MALUKU
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04
DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Telp. 0911 341171 Fax. 0911 355296
Ambon - Maluku 97128
e-mail : korwil.maluku@gmail.com



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

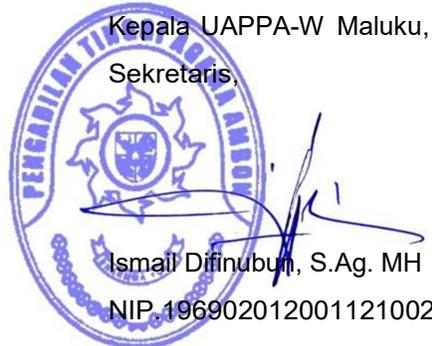
Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Oktober 2020

Kepala UAPPA-W Maluku,
Sekretaris,



Ismail Difiubun, S.Ag. MH
NIP.196902012001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	2
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
2. NERACA	2
3. LAPORAN OPERASIONAL	2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	8
A. PENJELASAN UMUM.....	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Ambon	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi.....	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1 Pendapatan	20
B.2 Belanja	21
B.3 Belanja Pegawai	22
B.4 Belanja Barang.....	22
B.5 Belanja Modal.....	23
B.5.1 Belanja Modal Tanah.....	23
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25
B.5.5 Belanja Modal Lainnya	25
B.6 Belanja Bantuan Sosial	25
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	26

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	26
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	26
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	27
C.4 Piutang Bukan Pajak	27
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	28
C.6 Tagihan Penjualan Angsuran	28
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar.....	28
C.8 Belanja Dibayar di Muka	29
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	30
C.10 Persediaan	30
C.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	30
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang.....	31
C.14 Tanah	32
C.15 Peralatan dan Mesin	33
C.16 Gedung dan Bangunan	33
C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34
C.18 Aset Tetap Lainnya	35
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	35
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
C.21 Aset Tak Berwujud.....	36
C.22 Aset Lain-Lain	36
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	37
C.24 Uang Muka dari KPPN	38
C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga.....	38
C.26 Pedapatan Diterima Dimuka.....	39
C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar	39
C.28 Ekuitas	39
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	40
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	40
D.2 Beban Pegawai	40
D.3 Beban Persediaan	41
D.4 Beban Barang dan Jasa	41
D.5 Beban Pemeliharaan	42
D.6 Beban Perjalanan Dinas	42
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	43
D.8 Beban Bantuan Sosial.....	43

D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	44
D.11	Kegiatan Non Operasional	45
D.12	Pos Luar Biasa	45
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	46
E.1	Ekuitas Awal.....	46
E.2	Surplus (Defisit) LO	46
E.3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	46
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	46
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	46
E.3.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	46
E.3.4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.3.5	Koreksi Lain-Lain	47
E.4	Transaksi Antar Entitas	47
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	48
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	48
E.5	Ekuitas Akhir	49
F.1	KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	50
F.2	PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	50
F.2.1	Rekening Pemerintah	50
Lampiran I:	Rincian Akumulasi Penyusutan	51

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon Maluku 97128

Telp. 0911 341171 Fax. 0911 355296 e-mail : korwil.maluku@gmail.com

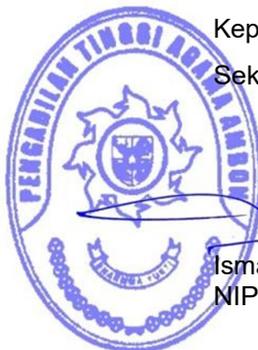
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Dirjen Badan Peradilan Agama Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Maluku yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 27 Oktober 2020

Kepala UAPPA-W Maluku,
Sekretaris,



Ismail Dfinubun, S.Ag. MH
NIP.196902012001121002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Triwulan III TA 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp84.273,500,- atau mencapai 184 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp45,839,000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp383,860,400,- atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp749,325,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2020. Nilai Aset per 30 September 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp47.745.398,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp47.075.300,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47.075.300,- dan Rp670.098,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2020 adalah sebesar Rp84,273,500,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp384,307,132,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(300,033,632)-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp(300,033,632)- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(300,033,632)-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(567,969,700),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp567,969,700,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk TA 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31
DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	65,256,000	100,062,900	153	59,157,800
JUMLAH PENDAPATAN		65,256,000	100,062,900	153	59,157,800
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-
Belanja Barang	B.4	667,025,000	665,095,000	100	728,607,500
Belanja Modal	B.5	-	-	0	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		667,025,000	665,095,000	100	728,607,500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NERACA PER 31 Desember 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Hibah yang belum disahkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31
DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	100,062,900	58,683,800
JUMLAH PENDAPATAN		100,062,900	58,683,800
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	2,937,600	9,296,503
Beban Barang dan Jasa	D.4	145,164,000	95,962,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	519,931,000	632,645,500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		668,032,600	737,904,003
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(567,969,700)	(679,220,203)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	474,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	474,000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	474,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(567,969,700)	(678,746,203)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(567,969,700)	(678,746,203)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31
DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	-	2,884,430
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(567,969,700)	(678,746,203)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	567,969,700	675,861,773
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Ambon

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Tinggi Agama Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Melalui peran Pengadilan Tinggi Agama Ambon diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2014 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkomitmen dengan visi:

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Ambon melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan penyederhaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintergrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif;
7. Meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah 44 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon	Uraian Satker	KP		KD		DK		TP		Jumlah Satker
			M	TM	M	BM	M	BM	M	BM	
1	04	Pengadilan Agama Ambon									1
2	04	Pengadilan Agama Tual									1
3	04	Pengadilan Agama Masohi									1
4	04	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu									1
5	04	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa									1
6	04	Pengadulan Agama Namlea									1
7	04	Pengadilan Agama Ambon									1
Jumlah											7

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

BM = Belum menyampaikan LK

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,

Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	45,839,000	45,839,000
Jumlah Pendapatan	45,839,000	45,839,000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	749,325,000	749,325,000
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp100,62,900,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp100,062,900,- atau mencapai 153 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp65,,-. Rincian pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	30,000	100
Pendapatan Uang Meja (Legas) dan Upah pada Panitera Badan	1,191,000	28,530,000	2,395
Pendapatan Ongkos Perkara	28,530,000	32,720,000	115
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	16,118,000	48,253,500	299
Jumlah	45,839,000	109,533,500	239

dibandingkan Tahun 2019 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30,000	75,000	100.00
Pendapatan Uang Meja (Legas) dan Upah pada Panitera Badan	3,270,000	2,692,000	21.47
Pendapatan Ongkos Perkara	32,720,000	44,875,000	(27.09)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48,253,500	52,420,900	(7.95)
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	474,000	(100.00)
Jumlah	84,273,500	100,536,900	(16.18)

Realisasi Belanja
Negara
Rp665,095,000,
-

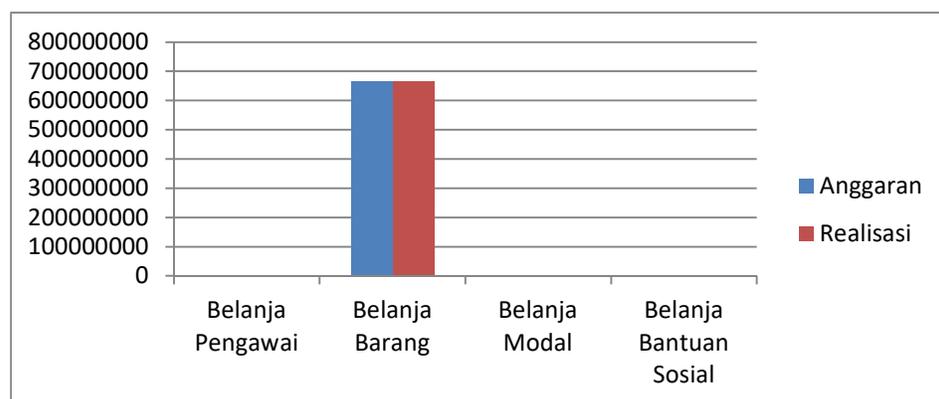
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp383,860,400,- atau 51% dari anggaran belanja sebesar Rp749,325,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	749,325,000	383,860,400	51
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	749,325,000	383,860,400	51
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	749,325,000	383,860,400	51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 8,72% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2019. Hal ini disebabkan antara lain belum berakhirnya TA 2019 sehingga realisasi belanja belum maksimal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	488,712,100	728,607,500	(32.93)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	488,712,100	728,607,500	(32.93)

Belanja Pegawai

Rp0,

-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dari Tahun 2019. Hal ini disebabkan tidak ada belanja pegawai tahun 2020 dan 2019

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	TA 2020	Tahun 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Barang

Rp383,860,400,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp383,860,400,- dan Rp488,712,100,-. Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2020 mengalami penurunan sebesar 8,72% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum berakhirnya TA 2019 sehingga realisasi belanja belum maksimal.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan Tahun 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-
Belanja Bahan	0	20,566,000	-
Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	-	-
Belanja Sewa	4,850,000	14,900,000	(67.45)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	255,375,000	470,121,000	(45.68)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,815,000	50,490,000	(23.12)
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kemasyarakat/Pemda			
Jumlah Belanja Kotor	299,640,000	556,077,000	(46.12)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	299,640,000	556,077,000	(46.12)

Belanja Modal
Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan dibandingkan Tahun 2018 disebabkan tidak ada belanja modal pada tahun 2019 dan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Tanah Rp0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada Tahun 2020 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan Tahun 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja modal tanah pada tahun 2018 dan 2019

Modal Pengerukan dan Pematangan Tanah pada TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Triwulan III TA 2019 dan Tahun 2018

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,-, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 dan 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 tidak mengalami penurunan dan kenaikan dibandingkan Realisasi Tahun 2018. Hal ini karena tidak adanya belanja modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 dan 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Triwulan III TA 2020 dan Tahun 2019

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2020	Tahun 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal TA 2020 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dibandingkan Realisasi Tahun 2018. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan Pada Tahun 2019 dan 2018

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2019 dan Tahun 2018*

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Lainnya Rp0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 tidak mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja Modal Lainnya pada tahun 2020 dan 2019

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.



PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp47,075,300,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp47,075,300,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 September 2020 dan 30 Desember 2019

No.	Uraian Satker	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
1	PA. Ambon	Saldo UP	0	0	0
2	PA. Tual	Saldo UP	0	0	0
3	PA. Masohi	Saldo UP	0	0	0
4	PA. Dataran Hunipopu	Saldo UP	0	0	0
5	PA. Dataran Hunimoa	Saldo UP	0	0	0
6	PA. Namlea	Saldo UP	0	0	0
7	PTA. Ambon	Saldo UP	47,075,300	0	0
Jumlah Total			47,075,300	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 September 2020 dan 31 Desember 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	
Juml	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak. Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
30 SEptember 2020 dan 31 Desember 2019*

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Penyisihan Piutang PNB	0	0
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan
Pajak Rp0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 30 SEptember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak pada 30 September 2020 sebesar Rp0,-

Bagian Lancar
 Tagihan Tuntutan
 Perbendaharaan/
 Tuntutan
 Ganti Rugi
 (TP/TGR) Rp0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

No	Debitur per Satker	30 September 2020	31 Desember 2019
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

C.6 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

No	Debitur per Satker	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1			
2			
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang Tak
 Tertagih – Piutang
 Lancar Rp0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Rincian Belanja dibayar dimuka tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah	0	0

Persediaan Rp0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai Berita Acara Opname fisik masing-masing Satuan Kerja (Terlampir).

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0,-

C.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah

tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Debitur per Satker	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Tagihan PA			
Lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5,522,500	0	27,613

C.14 Tanah

Tanah
Rp0

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Ambon per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp -
Mutasi tambah:	
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp -
Hibah (Masuk)	Rp -
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp -
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp -
	Rp -
Mutasi Kurang:	Rp -
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp -
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp -

Mutasi tambah:
Tidak ada
Mutasi Kurang:
Tidak ada

Peralatan dan
Mesin Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	-
Mutasi tambah:		
Hibah (Masuk)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Pembatalan Penghapusan	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Saldo Awal	Rp	-
Mutasi Kurang:	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	-

Mutasi tambah:

Tidak ada

Mutasi kurang:

Tidak ada

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan Rp0

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		-
Mutasi tambah:		
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi		-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		-
Pembelian		-
Pengembangan Nilai Aset		-
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi		-
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali		-
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi		-
Saldo per 31 Desember 2019		-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019		-
Nilai Buku per 31 Desember 2019		-

Mutasi tambah : Tidak ada

Mutasi Kurang : Tidak ada

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp5,192,584,889,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		-
Mutasi tambah:		
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi		-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		-
Mutasi kurang:		
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali		-
		-
Saldo per 30 Juni 2019		-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019		-
Nilai Buku per 30 Juni 2019		-

Mutasi tambah : tidak ada

Mutasi kurang : tidak ada

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Tetap Lainnya
Rp0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2019	0
Nilai Buku per 30 Desember 2019	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp0

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Aset Tak Berwujud
Rp0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember	0

Mutasi tambah: tidak ada

Mutasi kurang : tidak ada

Aset Lain-Lain
Rp0,-

Koreksi Pencatatan Rp0,- berupa Hak Lainnya pada Pengadilan Militer I-02 Ambon

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	0
Jumlah	0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 -

Mutasi tambah:

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -

Mutasi kurang:

Penghapusan (BMN yang dihentikan) -

Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) -

Saldo per 31 Desember 2019 -

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 -

Nilai Buku per 31 Desember 2019 -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp5,127,303,630,- dan Rp4,041,097,637,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	0	0	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No.	Uraian Satker	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	PA. Ambon	0	0
2	PA. Tual	0	0
3	PA. Masohi	0	0
4	PA. Dataran Hunipopu	0	0
5	PA. Dataran Hunimoa	0	0
6	PA. Namlea	0	0
7	PTA. Ambon	0	0
Jumlah		0	0

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp80,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	0	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,-

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	-	

Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,- dan Rp987.312.851,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas
Rp0

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas



PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp100,062,900,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp100,062,900,- dan Rp58,683,800,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	75,000	-	100.00
Pendapatan Uang Meja (Legas) dan	2,692,000	1,821,000	47.83
Pendapatan Ongkos Perkara	44,875,000	36,220,000	23.90
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	52,420,900	20,642,800	153.94
Jumlah	100,062,900	58,683,800	70.51

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Persediaan
Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0.00
Beban Persediaan Bahan Baku			
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges			
Beban Persediaan barang hasil sitaan			
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	0	0	0.00

Beban Barang dan
Jasa
Rp145,164,000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp145,164,000,- dan Rp95,962,000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena meningkatnya Beban Barang Operasional, Beban Langganan daya dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	20,566,000	3,600,000	471.28
Beban Barang Non Operasional	40,313,000	22,362,000	80.27
Pengembalian Beban Barang Non Operasioanal Lainnya	(615,000)	0	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0.00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0.00
Beban Konsultan	70,000,000	70,000,000	0.00
Beban Jasa Profesi	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	0	0	0.00
Beban Jasa Sewa	14,900,000	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralaran dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah	145,164,000	95,962,000	51.27

*Beban
Pemeliharaan Rp0
,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 0 TA 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan Beban Pemeliharaan disebabkan oleh Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Beban Persediaan bahan untuk operasional. Rincian beban pemeliharaan untuk Triwulan III TA 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban Perjalanan
Dinas Rp0*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp519,931,000,- dan Rp632,645,500,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya beban perjalanan biasa. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan Tahun

2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	470,121,000	622,345,500	(24.46)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(680,000)	(600,000)	13.33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,490,000	10,900,000	363.21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Jumlah	519,931,000	632,645,500	(17.82)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan Tahun 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Triwulan III TA 2019 dan Tahun 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik (Turun)%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Penyusutan	0	0	0.00
Beban Amortisasi Software	0	0	0.00
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Amortisasi	0	0	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0.00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan

Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2019 dan Tahun 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0,-

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0.00
Penjualan Alat Kantor	0	0	0.00
Selisih Kurs	0	0	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya	0	474,000	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	474,000	(100.00)

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp2,884,430,-.

Defisit LO
Rp(567,969,700),-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp(567,969,700),- dan Rp(678,746,203),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi tanah milik satker:

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada TA 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp675,861,773,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebesar Rp(215,594),- dan Rp(268,437,978),-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Triwulan III TA 2019 dan Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp567,969,700,- dan Rp675,861,773,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(100,062,900)
Ditagihkan ke Entitas Lain	665,095,000
Transfer Masuk	2,937,600
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	567,969,700

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga TA

2019, DDEL sebesar Rp(100,062,900),- sedangkan DKEL sebesar

Rp665,095,000,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Rp2,937,600,- Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Rp0,-

Rincian Transfer Masuk:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Buku Induk Perkara dan Akta Cerai	Dirjen Badilak MARI	2,937,600
	Jumlah		2,937,600

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan

Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp0,-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp670,098,- dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 September 2020

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional lingkup Pengadilan Tinggi Agama Ambon sampai dengan per 30 SEoptember 2020 sebanyak 2 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran : 1 rekening
 2. Rekening Pemerintah Lainnya : 1 rekening
- Jumlah : 2 rekening

Daftar rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya berupa rekening biaya perkara serta monitoring penutupan rekening per 30 September 2020 terlampir dalam Laporan Pendukung.

Lampiran I : Rincian Akumulasi Penyusutan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 25/11/20 4:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,500,000	600,000	0	600,000	4.8	11,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	12,500,000	600,000	0	600,000	4.8	11,900,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	12,500,000	600,000	0	600,000	4.8	11900000
	JUMLAH BELANJA	0	12,500,000	600,000	0	600,000	4.8	11,900,000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 25/11/20 4:22 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_wilayah --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	84,273,500	77,258,900	7,014,600	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	84,273,500	77,258,900	7,014,600	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	84,273,500	77,258,900	7,014,600	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	0	0	-
Beban Persediaan	446,732	0	446,732	-
Beban Barang dan Jasa	89,670,400	80,824,000	8,846,400	-
Beban Pemeliharaan	0	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	294,190,000	407,888,100	(113,698,100)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 25/11/20 4:22 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_wilayah --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	384,307,132	488,712,100	(104,404,968)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(300,033,632)	(411,453,200)	111,419,568	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(300,033,632)	(411,453,200)	111,419,568	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(300,033,632)	(411,453,200)	111,419,568	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LPE.WIL
Tanggal : 25/11/20 4:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_uappaw --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(300,033,632)	(411,453,200)	111,419,568	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	300,703,730	411,453,200	(110,749,470)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	670,098	0	670,098	-
EKUITAS AKHIR	670,098	0	670,098	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/11/20 4:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	61,241,000	39,601,000	8,902,400	0	8,902,400	22.48	30,698,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	33,000,000	31,500,000	26,678,000	360,000	26,318,000	83.55	5,182,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	102,241,000	75,101,000	35,580,400	360,000	35,220,400	47.38	39,880,600
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	70,000,000	70,000,000	49,000,000	0	49,000,000	70	21,000,000
522141	Belanja Sewa	5,100,000	5,100,000	4,850,000	0	4,850,000	95.1	250,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,500,000	600,000	0	600,000	4.8	11,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	75,100,000	87,600,000	54,450,000	0	54,450,000	62.16	33,150,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	605,249,000	534,969,000	255,375,000	0	255,375,000	47.74	279,594,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54,035,000	51,655,000	38,815,000	0	38,815,000	75.14	12,840,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	659,284,000	586,624,000	294,190,000	0	294,190,000	50.15	292,434,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	836,625,000	749,325,000	384,220,400	360,000	383,860,400	51.28	365,464,600
	JUMLAH BELANJA	836,625,000	749,325,000	384,220,400	360,000	383,860,400	51.28	365,464,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(04) MALUKU 005042100KD

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 25/11/20 4:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	45,839,000	84,273,500	(38,434,500)	184	65,256,000	77,258,900	(12,002,900)	118
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	45,839,000	84,273,500	(38,434,500)	184	65,256,000	77,258,900	(12,002,900)	118
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	749,325,000	383,860,400	365,464,600	51	667,025,000	488,712,100	178,312,900	73
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	749,325,000	383,860,400	365,464,600	51	667,025,000	488,712,100	178,312,900	73
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
WILAYAH/PROVINSI : 005042100KD

MAHKAMAH AGUNG
BA(005) ES1(04) MALUKU

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 25/11/20 4:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	30,000	0	30,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	1,191,000	3,270,000	0	3,270,000	274.56
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	28,530,000	32,720,000	0	32,720,000	114.69
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	16,118,000	48,253,500	0	48,253,500	299.38
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	45,839,000	84,273,500	0	84,273,500	183.85
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	45,839,000	84,273,500	0	84,273,500	183.85
	JUMLAH PENDAPATAN	45,839,000	84,273,500	0	84,273,500	183.85

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 005042100KD BA(005) ES1(04) MALUKU

Tgl. Cetak 25/11/2020 4:21 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	46,075,300	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	670,098	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	47,075,300
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	383,860,400
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	84,273,500	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,010,294	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,127,124
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	30,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	0	3,270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	32,720,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,253,500
3.0	521211	Beban Bahan	8,902,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	26,678,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	49,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,850,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	255,375,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,815,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	446,732	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	360,000
JUMLAH			518,696,324	518,696,324

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 WILAYAH/PROVINSI : 005042100KD BA(005) ES1(04) MALUKU

Tgl. Cetak 25/11/2020 4:10 AM
 lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	365,464,600	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	38,434,500	0
2.0	425232	Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada	1,191,000	0
2.0	425233	Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Yang Dialokasikan	28,530,000	0
2.0	425239	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Yang	16,118,000	0
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	39,601,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	4,000,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	31,500,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	70,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	5,100,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	12,500,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	534,969,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	51,655,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	30,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	3,270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	32,720,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,253,500
3.0	521211	Belanja Bahan	8,902,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	26,678,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	49,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,850,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	255,375,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,815,000	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	360,000
JUMLAH			833,958,500	833,958,500

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

UAPPW : 005042100KD BA(005) ES1(04) MALUKU

Tgl. Cetak 25/11/2020 4:22 PM
lap_neraca_uappaw_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	47,075,300	0	47,075,300	0.00
Persediaan	670,098	0	670,098	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	47,745,398	0	47,745,398	
JUMLAH ASET	47,745,398	0	47,745,398	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	47,075,300	0	47,075,300	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47,075,300	0	47,075,300	
JUMLAH KEWAJIBAN	47,075,300	0	47,075,300	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	670,098	0	670,098	0.00
JUMLAH EKUITAS	670,098	0	670,098	
JUMLAH EKUITAS	670,098	0	670,098	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	47,745,398	0	47,745,398	